

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: APAKAH AKSESIBILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI APARATUR MEMPENGARUHINYA

Luqyana<sup>1</sup>, Islahuddin<sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: [analuqy17@gmail.com](mailto:analuqy17@gmail.com)<sup>1</sup>, [islahuddin@unsyiah.ac.id](mailto:islahuddin@unsyiah.ac.id)<sup>\*2</sup>

\* Corresponding Author

## Abstract

*This study aims to determine the influence of accessibility of financial statement, government's internal control system, and apparatus competence on the accountability of regional financial management in Regency/City Governments in The Province of Aceh. The research was conducted in municipalities of Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tengah, City of Banda Aceh and Lhokseumawe. Representatives of municipalities/cities are determined randomly by looking at the geographical location of the area. Data was collected by distributing 70 research questionnaires to respondents, The Head of SKPD. The research questionnaires that were received back amounted to 62 questionnaires. The sampling technique used simple random sampling and analyzing the data obtained using multiple linear regression models facilitated by SPSS version 28. The results which were based on 62 responses show that (1) accessibility of financial statement has an effect on accountability of regional financial management, (2) government's internal control system has no effect on the accountability of regional financial management, (3) apparatus competence has an effect on accountability of regional financial management, and (4) accessibility of financial statement, government internal control system, and apparatus competence simultaneously effect the accountability of regional financial management.*

**Keywords:** *Accessibility of Financial Statements, Government Internal Control System, Apparatus Competence, Accountability of Regional Financial Management*

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan negara tersebut memerlukan aturan-aturan hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara, sehingga dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Herlina *et al.*, (2021) didefinisikan sebagai suatu proses pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat mengenai kegagalan juga capaian atas pengelolaan keuangan

daerah sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk dokumentasi dan ukuran penilaian pada tahun selanjutnya. Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan ini terlihat dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan laporan keuangan bagi pihak pengguna internal maupun eksternal laporan keuangan yang disusun tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kewajiban saja, namun haruslah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik artinya pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal, terhindar dari penyelewengan jabatan, taat aturan, dilakukan dengan strategi dan prosedur

yang baik, juga bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat. Terciptanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sebagaimana yang dijabarkan pada LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2020 adanya kesalahan penganggaran pada tiga puluh SKPK Aceh Utara sebesar Rp36.972.542.652 yang terjadi karena kurangnya kompetensi aparatur dalam keuangan daerah dan belum dilaksanakannya hasil evaluasi gubernur terkait penganggaran Dana Otonomi Khusus. Kesalahan penganggaran juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada 9 SKPD yang terjadi karena tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK belum sepenuhnya dituntaskan. Kesalahan ini mengakibatkan anggaran dan realisasi atas Pendapatan dan Belanja tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai faktor yang menunjang perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berfokus pada beberapa faktor tertentu yang diyakini ada pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyediakan aksesibilitas laporan keuangan kepada masyarakat. Efektifnya suatu aksesibilitas dinilai dengan dapat dibaca dan dipahaminya laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan (Antika *et al.*, (2020). Internet merupakan jalan termudah agar aksesibilitas dapat berjalan efektif. Pemerintah dapat meng-*upload* laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah masing-masing atau menyediakan media tertentu bagi publik untuk mengakses laporan keuangan. Hanya saja, fenomena yang terjadi saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh tidak menyediakan laporan keuangan beberapa tahun terakhir pada *website* Pemerintah Daerahnya. Hal ini mengartikan bahwa aksesibilitas belum optimal sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum berjalan baik.

Hal lain dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengendalian internal. Pengendalian Internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan di lingkungan pemerintah pusat dan juga daerah yang

diatur lebih lanjut dengan adanya Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah harus menerapkan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. Jika penyelenggaraan pemerintah telah dilaksanakan dengan menerapkan pengendalian internal, maka kegiatan pemerintah akan terarah berdasarkan aturan yang berlaku sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan baik.

Namun, meskipun telah ditetapkan aturan mengenai pengendalian internal, faktanya BPK masih menemukan kelemahan dalam pengendalian internal. Fenomena tersebut dilaporkan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk berbagai Kabupaten/Kota di Aceh seperti adanya kesalahan penganggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dan juga tidak memadainya pengelolaan asset tetap di beberapa kabupaten/kota serta penyelesaian asset pihak ketiga yang berlarut-larut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal yang belum optimal akan mempengaruhi perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor pendukung lainnya dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki dengan pengetahuan juga keterampilan yang memadai yang disertai dengan adanya pengalaman kerja di bidangnya sehingga dapat memahami hal-hal yang berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Riska, 2020). Jika aparatur memiliki kompetensi yang baik, maka kegiatan berjalan dengan patuh pada ketentuan sehingga tidak adanya temuan yang dihasilkan dari audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi dapat ditingkatkan dengan melakukan pengujian keahlian dan rutusnya pelaksanaan pelatihan sehingga kompetensi dan mutu yang dimiliki dapat meningkat yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Herlina *et al.*, 2021).

Untuk bisa menyelesaikan fenomena yang terjadi, perlu adanya penelitian yang dilakukan agar

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah aksesibilitas, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur mempengaruhinya".

## 2. LANDASAN TEORI

### *Agency Theory*

Penelitian ini menggunakan *agency theory* dalam menjelaskan tujuan penelitian. *Agency Theory* menjelaskan hubungan dalam bentuk kontrak kerja antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang diberikan wewenang (*agent*) (Subhan, 2011 dalam Hulu, 2020). Artinya bahwa dalam teori keagenan ini, agen dikontrak oleh *principal* untuk melaksanakan tugas yang dibebankan juga bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tersebut kepada *principal*.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bahwa dengan adanya aksesibilitas akan membebaskan pemerintahan dari adanya informasi asimetri sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, adanya pengendalian internal dan kompetensi aparatur akan mengarahkan kegiatan pemerintahan yang menjunjung kepentingan publik berdasarkan aturan yang ditetapkan dan keahlian yang dimiliki aparatur di bidangnya masing-masing sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan optimal.

### *Teori Signaling*

Penelitian ini juga menggunakan teori *signaling* dalam menjelaskan tujuan penelitian. Teori ini menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan agar meminimalisir asimetri informasi (Siagian *et al.*, 2022). Tujuan pemberian sinyal juga dijelaskan oleh Hendriyani & Tahar (2015) yaitu agar pemerintah yang saat ini berjalan akan terus mendapat dukungan dari rakyat. Pemberian sinyal oleh pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menyediakan laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan pengendalian internal, lengkapnya pengungkapan, dan detailnya penjelasan yang diungkapkan.

Teori *signaling* dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa pemberian sinyal dalam bentuk

laporan keuangan yang didukung dengan aksesibilitas kepada masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemberian sinyal positif lainnya juga dapat dilakukan dengan penerapan pengendalian internal sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat mencapai tujuan dengan mengikuti pedoman aturan yang telah ditetapkan.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Azizah *et al.*, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Menurut Mudjiyono (2018) dalam Wijayanti (2021) terdapat empat dimensi akuntabilitas bagi sektor publik, yaitu:

- Akuntabilitas program, yaitu pertimbangan mengenai pencapaian tujuan juga program yang dapat mengoptimalkan hasil dengan meminimalkan pengeluaran biaya.
- Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, yaitu pencegahan yang dilakukan agar dapat menghindari terjadinya penyelewengan jabatan dan kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.
- Akuntabilitas proses, yaitu baiknya prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan seperti sistem informasi akuntansi, penerapan sistem manajemen, juga prosedur administrasi.
- Akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada Dewan Perwakilan Rakyat juga masyarakat.

### **Aksesibilitas**

Menurut UURI No. 33 Tahun 2004 bahwa daerah menyampaikan informasi keuangan daerah dan menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Informasi tersebut merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan didapatkan masyarakat. Hal yang sama juga diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengumumkan informasi keuangan berupa laporan keuangan kepada masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu kemudahan pengaksesan laporan keuangan pemerintah daerah oleh para pengguna laporan keuangan (Antika *et al.*, 2020). Fauziyah & Handayani (2017) mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria dalam menilai aksesibilitas, yaitu keterbukaan, kemudahan, dan *Accessible*.

**Pengendalian Internal**

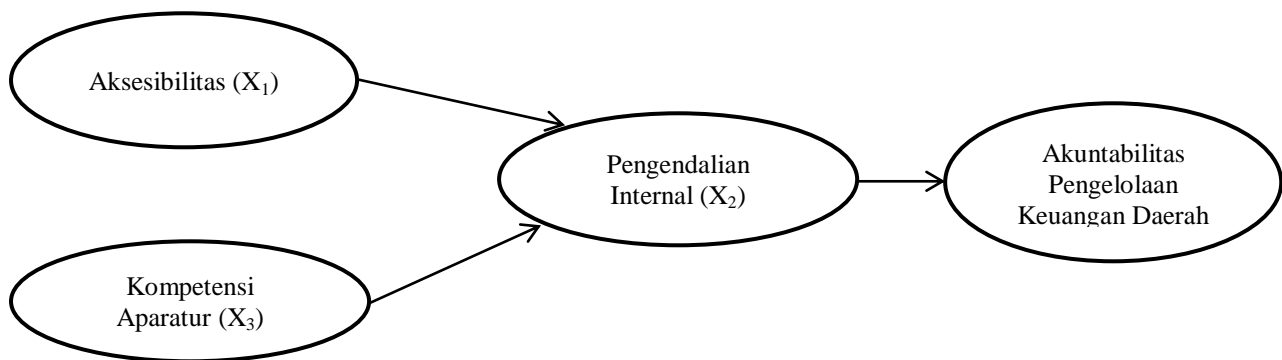
Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan juga seluruh pegawai secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan yang memada mengenai pencapaian tujuan organisasi yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya diatur dengan adanya Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan ini. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut, terdapat lima unsur dari pengendalian internal, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian,
- b. Penilaian risiko,
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi, dan
- e. Pemantauan pengendalian intern

**Kompetensi Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bahwa “kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif”. Menurut Riska (2020) aparatur merupakan pegawai pemerintah daerah yang mengemban tugas untuk melayani masyarakat dengan mengedepankan sikap profesional, disiplin, adil, jujur, dan merata dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di lingkungan pemerintah. Maka kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dapat diukur dan dinilai berdasarkan perilaku kerja atau kinerja aparatur tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan pengetahuan, juga menunjukkan sikap baik serta menjadikan pengalaman kerjanya sebagai pedoman. Menurut (Herlina *et al.*, 2021) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

**Kerangka Konseptual**



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Konseptual

**Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H<sub>2</sub> : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>3</sub> : Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>4</sub> : Aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hipotesis penelitian. Variabel independen yaitu aksesibilitas, pengendalian internal dan kompetensi aparatur dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen penelitian.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mengukur variabel penelitian menurut persepsi responden dan mencari keterkaitan di antara variabel-variabel yang dimaksud menggunakan kuesioner yang bersumber dari Mudjiyono (2018) dalam Wijayanti (2021), Antika *et al.*, (2020), Sudriarianti (2015) dalam Wijayanti (2021), dan Daulay (2021) dengan Kepala SKPD pada lima Kabupaten/Kota sebagai responden penelitian.

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner dalam bentuk tautan *google form* kepada seluruh responden pada SKPD Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe juga mengantarkan secara langsung kuesioner tersebut ke SKPD di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Seluruh kuesioner akan dikumpulkan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan peneliti untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data.

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe yang berjumlah 235 SKPD.

Pemilihan perwakilan kabupaten/kota tersebut ditentukan acak dengan memperhatikan letak wilayah secara geografis yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi kabupaten/kota secara umum. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yang dihitung menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 0,1 sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian sebanyak 70 SKPD.

#### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan Program *Software Statistic Product and Service Solution* (SPSS versi 28).

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan statistik variabel penelitian didapat dari 62 kuesioner mengartikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dikatakan baik begitupun dengan aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur.

##### a. Aksesibilitas

Hasil perhitungan statistik berdasarkan persepsi responden mengenai aksesibilitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,485 yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah responden menjawab "Setuju".

##### b. Pengendalian Internal

Hasil perhitungan statistik berdasarkan persepsi responden mengenai pengendalian internal memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,368 yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah responden menjawab "Setuju".

##### c. Kompetensi Aparatur

Hasil perhitungan statistik berdasarkan persepsi responden mengenai kompetensi aparatur memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,38 yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah responden menjawab "Setuju".

##### d. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan statistik berdasarkan persepsi responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai



rata-rata sebesar 4,37 yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah responden menjawab “Setuju”.

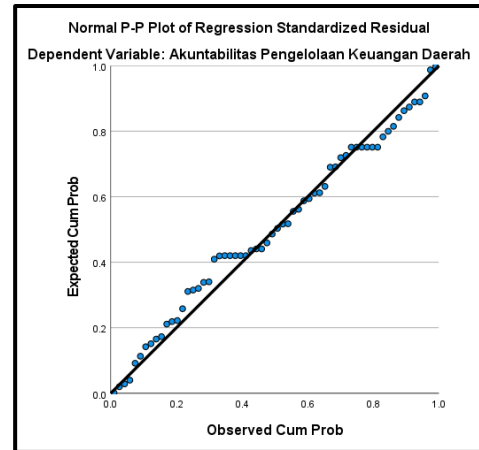
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4. 1 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30478876
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.066
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.193

Sumber: Data Diolah (2022)



Gambar 4.1 Uji Normalitas Data

Pada tabel dan gambar diatas menunjukkan hasil bahwa data penelitian terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Aksesibilitas	.484	2.067
	Pengendalian Internal	.431	2.320
	Kompetensi Aparatur	.476	2.101

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antara variabel independen penelitian.

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa model regresi penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.546
Aksesibilitas	.836
Pengendalian Internal	.489
Kompetensi Aparatur	.871
a. Dependent Variable: RES2	

**Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.798	3.695		2.381	.021
	Aksesibilitas	.595	.261	.314	2.281	.026
	Pengendalian Internal	.124	.103	.177	1.211	.231
	Kompetensi Aparatur	.383	.187	.285	2.053	.045
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah						

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada tabel 4.4, maka persamaan regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,798 + 0,595X_1 + 0,124X_2 + 0,383X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut menjelaskan beberapa hal, yaitu:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) adalah 8,798. Jika seluruh variabel independen yaitu Aksesibilitas ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ), dan Kompetensi Aparatur ( $X_3$ ) nilainya konstan atau 0, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ) bernilai 8,798.
- Nilai koefisien regresi  $X_1$  ( $\beta_1$ ) adalah 0,595. Koefisien regresi bernilai positif yang artinya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,595 untuk setiap peningkatan unit aksesibilitas ketika variabel independen lainnya dianggap nol atau konstan.
- Nilai koefisien regresi  $X_2$  ( $\beta_2$ ) adalah 0,124. Koefisien regresi bernilai positif yang artinya setiap peningkatan satuan pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah ( $Y$ ) sebesar 0,124 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol atau konstan.
- Nilai koefisien regresi  $X_3$  ( $\beta_3$ ) adalah 0,383. Koefisien regresi bernilai positif yang artinya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,383 untuk setiap peningkatan unit kompetensi aparatur ketika variabel independen lainnya dianggap nol atau konstan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Pengujian signifikansi parsial atau Uji-t dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Pengambilan keputusan mengenai penolakan atau penerimaan suatu hipotesis dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi variabel. Untuk pengambilan keputusan tersebut, maka nilai  $t_{tabel}$  harus ditentukan

dengan nilai *degree of freedom* (df) yaitu 58 sehingga didapat nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,00172. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah:

- Aksesibilitas ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,281 dan nilai sig. 0,026. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, atau dengan kata lain aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Pengendalian internal ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,211 dan nilai sig. sebesar 0,231. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai sig.  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) ditolak, atau dengan kata lain pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Pada hasil uji statistik di atas, variabel kompetensi aparatur ( $X_3$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,053 dan nilai sig. 0,045. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima, atau dengan kata lain kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian signifikansi simultan atau Uji-F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen yaitu aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur secara simultan terhadap variabel bebas yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengambilan keputusan mengenai uji-F ini dapat ditentukan dengan melihat jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig.  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Nilai  $F_{tabel}$  pada penelitian ini dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,76. Hasil uji signifikansi simultan ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	285.900	3	95.300	17.058	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	324.035	58	5.587		

Total	609.935	61		
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari hasil uji-F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,058. Maka dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh semua variabel bebas secara simultan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.441	2.364
a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal				

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4.6 menampilkan bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,441 atau 44,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 44,1 persen sedangkan sisanya sebesar 55,9 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,281 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,00172 dan nilai sig. 0,026 yang lebih kecil dari 0,05 pada uji signifikansi parsial variabel aksesibilitas. Hasil lain dari analisis regresi linear berganda adalah terdapat hubungan positif antara aksesibilitas dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,595. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Aceh akan lebih akuntabel ketika laporan keuangan dapat diakses oleh siapa saja. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat seiring tersedianya aksesibilitas.

Baiknya aksesibilitas dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan. Mudahnya akses laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan maka publik dapat

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Semakin nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi penelitian ditampilkan pada tabel 4.6 berikut:

mengontrol pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah. Banyaknya pihak yang mengontrol pengelolaan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas. Lebih banyaknya informasi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan daerah daripada masyarakat yang merupakan pihak pemberi wewenang yang diketahui sebagai *agency problem* sebagaimana dijelaskan dalam *agency theory* akan dapat diatasi dengan adanya pemberian aksesibilitas. Hal ini juga didukung dengan adanya teori *signaling* bahwa penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu tanggungjawab dalam pemberian sinyal mengenai pengelolaan keuangan yang bertujuan agar mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai aturan dan harapan serta menghindari adanya informasi yang asimetri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Antika *et al.*, (2020), Superdi (2017), Fauziyah & Handayani (2017), dan Hulu (2020) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.



### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Regresi linear berganda menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,124 untuk pengendalian internal. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.211 yang lebih rendah dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,00172, dan nilai sig. 0,231 yang lebih besar dari 0,05 yang didapat pada uji signifikansi parsial. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Menurut hasil penelitian Artini & Putra (2020) dan Putri (2018), tidak berpengaruhnya pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan masih terdapat penerapan pengendalian internal yang belum berjalan optimal sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada hasil penelitian tersebut, jika dilihat dari penilaian responden pada kuesioner penelitian ini, pengendalian internal yang belum berjalan optimal yaitu pelaksanaan analisis risiko terhadap sistem dan prosedur akuntansi, pengotorisasi transaksi yang dimasukkan ke dalam komputer, juga penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur pengamanan fisik atas aset yang dibuktikan dengan rendahnya penilaian yang diberikan responden untuk item pernyataan tersebut.

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,053 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,00172 dan nilai sig. 0,045 yang lebih rendah dari 0,05 pada uji signifikansi parsial variabel kompetensi aparatur. Selain itu, pada analisis regresi linear berganda terdapat hubungan positif antara kompetensi aparatur dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,383. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Kompetensi aparatur dapat dinilai dengan adanya interpretasi dari pengetahuan, kemampuan, juga keahlian yang dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas yang diembannya. Jika aparatur memiliki kompetensi yang baik, menjalankan tugas hingga menyelesaikan permasalahan yang muncul

akan berjalan lancar. Hasil penelitian ini didukung dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa dalam pemerintahan akan timbul masalah keagenan seperti *self interest*. Baiknya tingkat kompetensi aparatur akan mengarahkan kegiatan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik berdasarkan aturan yang ditetapkan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan kompetensi yang dimiliki aparatur di bidangnya masing-masing sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan optimal. Pengelolaan keuangan yang akuntabel ditunjang dengan adanya pengetahuan, kemampuan, dan keahlian. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herlina *et al.*, (2021) dan Setyanto & Ritchi (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Aksesibilitas, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian signifikansi simultan variabel independen terhadap variabel dependen memiliki nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,058 yang lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu 2,76 dan nilai sig. <0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan pada penelitian ini yang mengartikan bahwa aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur secara simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Saran

### Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengumpulkan data penelitian bukan hanya melalui data kuesioner saja namun juga melakukan observasi secara langsung atau wawancara dengan para responden sehingga hasil dari penelitian dapat lebih dijelaskan secara luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menjadikan pihak eksternal di luar pemerintahan seperti masyarakat dalam mengumpulkan data penelitian dan sehingga dapat menjelaskan variabel yang diteliti dari sudut pandang yang berbeda.

### Saran Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dengan melihat variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai faktor penunjang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan untuk meningkatkan pengendalian internal dengan memperhatikan beberapa aspek yang belum dilaksanakan sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditentukan.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi tertentu yang tidak dapat terlakkan saat penelitian dilakukan, yaitu:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian sehingga adanya kemungkinan tidak seriusnya responden dalam mengisi kuesioner yang berakibat terdapat perbedaan antara persepsi responden dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini dilakukan di masa Pandemi Covid-19 dengan lingkup SKPD di lima Kabupaten/Kota yang penyebaran kuesioner dilakukan melalui tautan *google form* sehingga adanya beberapa

responden yang tidak memahami tata cara pengisian kuesioner tersebut.

### Daftar Pustaka

- Antika, Z., Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218.
- Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i2.18>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020*. Mei. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020*. April. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020*. April. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. Banda Aceh.

- Daulay, D. R. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teonologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965>.
- Hulu, S. (2020). Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara. *Tesis*, 1–93. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29268/187017010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 30 Desember 2020. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 *Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara*. 13 Januari 2020. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Riska, L. D. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(April), 89–105.
- Siagian, A. O., Asrini, A., & Wijoyo, H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Akuntansi Lingkungan, Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(2), 67–76. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1316/1055>.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangann; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; (studi empiris pada satuan kerja; perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah*

*Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Wijayanti, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Ponorogo). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.